

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN  
BALAI GURU PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pembentukan Balai Guru Penggerak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa pembentukan Balai Guru Penggerak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja mengenai Balai Guru Penggerak dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf u sehingga Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BBGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. BBGP Provinsi Sumatera Utara;
  - b. BBGP Provinsi Jawa Barat;
  - c. BBGP Provinsi Jawa Tengah;
  - d. BBGP Provinsi Jawa Timur;
  - e. BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
  - f. BBGP Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) BGP Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. BGP Provinsi Aceh;
  - b. BGP Provinsi Sumatera Barat;
  - c. BGP Provinsi Riau;
  - d. BGP Provinsi Jambi;
  - e. BGP Provinsi Sumatera Selatan;
  - f. BGP Provinsi Lampung;
  - g. BGP Provinsi Banten;
  - h. BGP Provinsi Bali;
  - i. BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - j. BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - k. BGP Provinsi Kalimantan Barat;
  - l. BGP Provinsi Kalimantan Timur;
  - m. BGP Provinsi Kalimantan Selatan;
  - n. BGP Provinsi Kalimantan Tengah;
  - o. BGP Provinsi Sulawesi Utara;
  - p. BGP Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - q. BGP Provinsi Sulawesi Tengah;
  - r. BGP Provinsi Maluku;
  - s. BGP Provinsi Papua;
  - t. BGP Provinsi Papua Barat; dan
  - u. BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) BGP Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. BGP Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. BGP Provinsi Bengkulu;
  - d. BGP Provinsi Kalimantan Utara;
  - e. BGP Provinsi Sulawesi Barat;
  - f. BGP Provinsi Gorontalo; dan
  - g. BGP Provinsi Maluku Utara.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 720

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK BALAI  
GURU PENGGERAK

NOMENKLATUR DAN LOKASI  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI
<b>BALAI BESAR GURU PENGGERAK (BBGP)</b>		
1.	BBGP Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sumatera Utara
2.	BBGP Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Jawa Barat
3.	BBGP Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
4.	BBGP Provinsi Jawa Timur	Kota Batu, Jawa Timur
5.	BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
6.	BBGP Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
<b>BALAI GURU PENGGERAK (BGP)</b>		
<b>BGP Tipe A</b>		
1.	BGP Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
2.	BGP Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman, Sumatera Barat
3.	BGP Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Riau
4.	BGP Provinsi Jambi	Kabupaten Batanghari, Jambi
5.	BGP Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Sumatera Selatan
6.	BGP Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Lampung
7.	BGP Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang, Banten
8.	BGP Provinsi Bali	Kota Denpasar, Bali
9.	BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
10.	BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
11.	BGP Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
12.	BGP Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
13.	BGP Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
14.	BGP Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI
15.	BGP Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Sulawesi Utara
16.	BGP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
17.	BGP Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu, Sulawesi Tengah
18.	BGP Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
19.	BGP Provinsi Papua	Kota Jayapura, Papua
20.	BGP Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari, Papua Barat
21.	BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
BGP Tipe B		
1.	BGP Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
2.	BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
3.	BGP Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu
4.	BGP Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
5.	BGP Provinsi Sulawesi Barat	Kota Mamuju, Sulawesi Barat
6.	BGP Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
7.	BGP Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

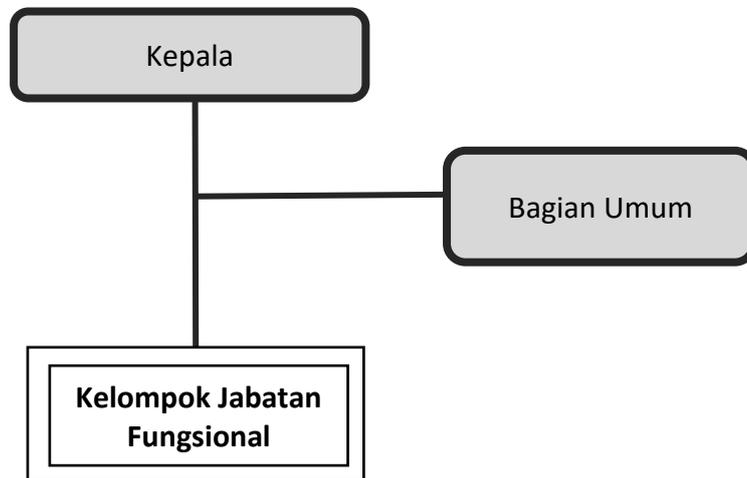
ttd.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

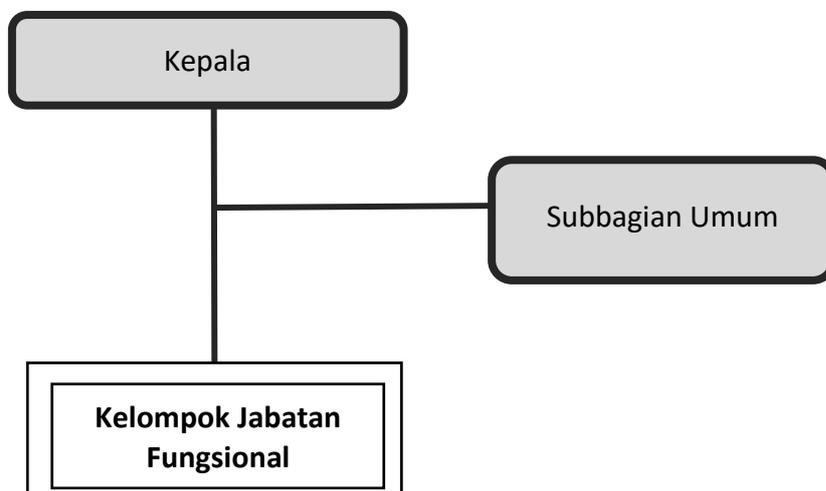
SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK BALAI  
GURU PENGGERAK

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK

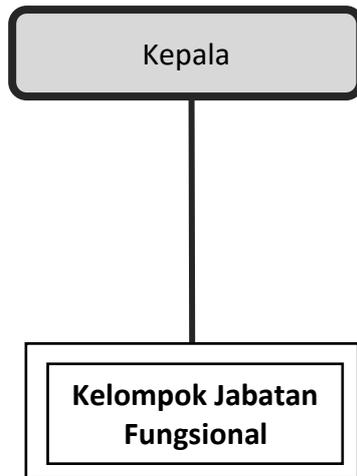
1. BBGP Provinsi Sumatera Utara, BBGP Provinsi Jawa Barat, BBGP Provinsi Jawa Tengah, BBGP Provinsi Jawa Timur, BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta, dan BBGP Provinsi Sulawesi Selatan



2. BGP Provinsi Aceh, BGP Provinsi Sumatera Barat, BGP Provinsi Riau, BGP Provinsi Jambi, BGP Provinsi Sumatera Selatan, BGP Provinsi Lampung, BGP Provinsi Banten, BGP Provinsi Bali, BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, BGP Provinsi Kalimantan Barat, BGP Provinsi Kalimantan Timur, BGP Provinsi Kalimantan Selatan, BGP Provinsi Kalimantan Tengah, BGP Provinsi Sulawesi Utara, BGP Provinsi Sulawesi Tenggara, BGP Provinsi Sulawesi Tengah, BGP Provinsi Maluku, BGP Provinsi Papua, BGP Provinsi Papua Barat, dan BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



3. BGP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BGP Provinsi Bengkulu, BGP Provinsi Kalimantan Utara, BGP Provinsi Sulawesi Barat, BGP Provinsi Gorontalo, dan BGP Provinsi Maluku Utara.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001